

SIARAN PERS

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, Jumat 6 November 2015 - BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pemeriksaan kinerja ini adalah pemeriksaan tematik pusat (BPK RI) yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, dan yang menjadi sampel di Kalimantan Barat adalah Provinsi Kalimantan Barat dan salah satu Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kubu Raya. Tujuan Pemeriksaan Kinerja ini adalah untuk menilai efektivitas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang secara spesifik diarahkan untuk menilai aspek utama yang signifikan dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang meliputi Aspek Komitmen, Regulasi dan Kebijakan, Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan, Aset dan TI, serta Aspek Pengelolaan Teknologi Informasi.

Hasil Pemeriksaan menyimpulkan bahwa kedua pemerintah daerah tersebut telah melakukan upaya-upaya dalam mengimplementasikan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Laporan Keuangannya, namun hasilnya masih belum sepenuhnya efektif. Adapun kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki adalah pada aspek: 1) Regulasi dan Kebijakan terkait penambahan masa manfaat aset tetap hasil overhaul maupun renovasi (Provinsi Kalimantan Barat) dan untuk Kabupaten Kubu Raya sama seperti Provinsi Kalimantan Barat dengan tambahan: persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang serta pengakuan piutang dan pengakuan Pendapatan LO yang belum berdasarkan SAP Berbasis Akrual; 2) Pengelolaan SDM pengelola keuangan, aset dan TI yaitu belum updatenya data kepegawaian dan belum adanya uraian tugas pengelola TI (Provinsi Kalimantan Barat) dan Pengelolaan SDM Pengelola keuangan, aset, dan TI yaitu tidak lengkapnya riwayat pendidikan dan pelatihan serta data tenaga kontrak/honorer (Kabupaten Kubu Raya) dan 3) Belum adanya analisis kebutuhan dan pengembangan aplikasi (sama untuk Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kubu Raya).

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat juga mengundang entitas di luar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kubu Raya terkait hasil pemeriksaan kinerja yang sudah dilaksanakan, dengan harapan agar hasil pemeriksaan ini dapat dijadikan masukan untuk pemerintah daerah yang lain untuk mempersiapkan diri dalam mengimplementasikan penerapan Sistem Akrual Basis yang harus dilaksanakan dalam menyusun LKPD Tahun 2015. Selain itu diundang pula Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, beliau sengaja diundang dengan tujuan agar seluruh instansi pemerintah daerah bersinergi dan kami harapkan BPKP berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan pendampingan dalam menyusun LKPD TA 2015.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan pemaparan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat oleh Tim Pemeriksa mengenai hal-hal penting dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Telp (0561) 585349 Fax (0561) 713598